

**DISKRESI KEPOLISIAN DALAM KEBIJAKAN TERHADAP PELAKU
PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO
DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Di Satreskrim Narkotika Polresta Sidoarjo)**

SKRIPSI

Oleh

Achmad Asryel Akbar

NIM. 05020320025



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Asryel Akbar
NIM : 05020320025
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Diskresi Kepolisian Dalam Kebijakan Terhadap
Pelaku Peredaran Narkotika di Wilayah Kabupaten
Sidoarjo Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum
Pidana Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 November 2023
Saya yang menyatakan,



Achmad Asryel Akbar
NIM. 05020320025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Achmad Asryel Akbar
NIM. : 05020320025
Judul : Diskresi Kepolisian Dalam Kebijakan Terhadap Pelaku
Peredaran Narkotika di Wilayah Kabupaten Sidoarjo
Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam
(Studi di Satreskrim Narkotika Polresta Sidoarjo)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 24 November 2023
Pembimbing,



Syamsuri, M.HI

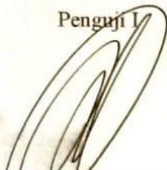
NIP. 197210292005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Asryel Akbar NIM. 05020320025 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Selasa, 12 Desember 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Prodi Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqosah

Penguji I



Dr. Syamsuri M. HI
NIP. 197210292005011004

Penguji II



H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag., S.H., M. HI, Dip. Lead.
NIP. 197606132003121002

Penguji III



Marli Candra, LLB (Hons.), MCL.
NIP. 198506242019031005

Penguji IV



Mukhammad Nur Hadi, M.H.
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 12 Desember 2023
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Sa'adah Musafa'ah, M. Ag
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Asryel Akbar
NIM : 05020320025
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : asryel84@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Diskresi Kepolisian Dalam Kebijakan Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika di Wilayah
Sidoarjo Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi di Satreskrim Narkotika
Polresta Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Januari 2023

Penulis

(Achmad Asryel Akbar)

ABSTRAK

Peredaran narkoba adalah suatu permasalahan yang harus diselesaikan, karena efek dari peredaran narkoba berpengaruh terhadap perkembangan anak bangsa. Hal tersebut dilakukan oleh pihak Kepolisian Polresta Sidoarjo yang menaungi Wilayah Kabupaten Sidoarjo. Bentuk tindakan Kepolisian berupa menggunakan wewenang diskresi, yang mana Kepolisian dapat bertindak walaupun belum terdapat Undang-Undang yang mengatur atau dapat dikatakan bergerak atas dasar keyakinannya. Pertimbangan Polisi dalam melakukan hal tersebut karena keuntungan yang diberikan lebih banyak daripada kerugian yang ditimbulkan. Maka dari kasus diatas timbul rumusan masalah yakni bagaimana diskresi kepolisian dalam kebijakan terhadap pelaku peredaran narkoba di Wilayah Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari Hukum Positif dan bagaimana diskresi kepolisian dalam kebijakan terhadap pelaku peredaran narkoba di Wilayah Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan metode empiris jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang menggunakan sumber data lapangan sebagai bahan untuk dilakukannya suatu kajian. Pada pengumpulan data, penulis menggunakan pendekatan hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*). Sumber data didapatkan dari wawancara kepada seseorang yang memiliki keahlian dibidangnya. Wawancara dilakukan di Polresta Sidoarjo dengan narasumber Kepala Urusan Bidang OPS selaku pembantu Kasat Reskrim dalam mengajukan pertimbangan, merumuskan, menyiapkan rencana program kegiatan Satuan Reskrim dan mengajukan saran terhadapnya.

Ditemukan penyelesaian kasus peredaran narkoba yang dilakukan oleh Polresta Sidoarjo berupa *under cover buy* dan *restorative justice* berupa rehabilitasi. Rehabilitasi diberikan kepada seorang penyalahgunaan narkoba atas rujukan dari kepala kantor kepolisian pada satuan narkoba. Hal tersebut yang menjadi bentuk diskresi kepolisian dalam memberikan keputusan terhadap seseorang yang berhak mendapatkan rehabilitasi. Pihak kepolisian juga dibantu oleh Badan Narkotika Nasional ketika memberikan keputusan, karena sebelum keputusan itu dikeluarkan memertika beberapa pertimbangan yang diberikan oleh Badan Narkotika Nasional. Terdapat beberapa bentuk pertimbangan terkait dengan kelayakan seorang pengguna narkoba diberikan rehabilitasi, diantaranya adalah orang tersebut benar-benar pengguna, bukan termasuk pengedar, dan mengalami kecanduan akan narkoba.

Karya tulis ini masih terdapat banyak kekurangan, maka penulis berharap akan ada penelitian dengan konsep yang sama akan tetapi dengan bentuk karya yang berbeda. Karena masih banyak hal yang perlu dikaji terhadap diskresi kepolisian, baik dalam aspek prosedural, ataupun aspek yang lainnya agar tidak terdapat pihak yang dirugikan dengan adanya diskresi tersebut.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Hasil Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PELAKU PEREDARAN NARKOTIKA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	25
A. Tinjauan Hukum Positif Diskresi Kepolisian Dalam Menangani Pelaku Peredaran Narkotika.....	25
1. Diskresi Menurut Ahli dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014	25

2.	Sejarah Sistem Diskresi Di Indonesia	28
3.	Dasar Hukum Diskresi Kepolisian	32
4.	Teori Diskresi Kepolisian	37
5.	Dasar Hukum Peredaran Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009	39
B.	Tinjauan Hukum Pidana Islam	43
1.	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Diskresi	43
2.	Klasifikasi jarimah dalam Hukum Pidana Islam	48
BAB III PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO (Studi Di Satreskrim Narkotika Polresta Sidoarjo).....		
A.	Gambaran Umum Kantor Kepolisian Resort Kota Sidoarjo.....	55
1.	Profil Kantor Kepolisian Resort Kota Sidoarjo.....	55
2.	Visi dan Misi Kantor Kepolisian Resort Kota Sidoarjo	56
3.	Struktur Organisasi Satuan Reserse.....	58
4.	Data Kasus Lanjut Peredaran Narkotika di Wilayah Sidoarjo	59
B.	Diskresi Kepolisian Dalam Melakukan Pemberantasan Kasus Peredaran Narkotika di Wilayah Kabupaten Sidoarjo	61
BAB IV ANALISIS DISKRESI KEPOLISIAN DALAM KEBIJAKAN TERHADAP PELAKU PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM		
A.	Analisis Diskresi Kepolisian Dalam Kebijakan Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika di Wilayah Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari Hukum Positif..	65
B.	Analisis Diskresi Kepolisian Dalam Kebijakan Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika di Wilayah Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam.....	74
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	83

B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	89



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara dengan IPDA M Junaedi, S.H., M.M. selaku Kepala Urusan Bimbingan OPS	89
Gambar 2 Wawancara dengan IPDA M Junaedi, S.H., M.M. selaku Kepala Urusan Bimbingan OPS	89
Gambar 3 Wawancara dengan IPDA M Junaedi, S.H., M.M. selaku Kepala Urusan Bimbingan OPS	90
Gambar 4 Wawancara dengan IPDA M Junaedi, S.H., M.M. selaku Kepala Urusan Bimbingan OPS	90
Gambar 5 Surat Keterangan Penelitian Dari Polresta Sidoarjo.....	91
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo.	58



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Kasus lanjut Tahun 2023.....	60
--	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Yogyakarta: Pustaka Azzam, 1986.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Cet-1. Jakarta Selatan: Pustaka Firdaus, 2007.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Mausū'ah Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Al-Qadāyā Al-Mu'āṣirah*. Edisi ke-5. Damsyik: Dar al-Fikr, 2010.
- Amri, Aslamuddin. "Konsep Diskresi Pejabat Pemerintah (Telaah Ketatanegaraan Islam)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.
- An-Naisaiburi, and Imam Abi Al-Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Juz 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Arif, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Atmosudirjo, S. Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Bagian Kaurmintu Reserse Narkoba. *Struktur Organisasi Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo*. Polresta Sidoarjo, 2023.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Devi, Mayasari. "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Diskresi Kepolisian (Studi Di Polsek Kembaran)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2019.
- DPR RI. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 2002.
- . *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, 2009.
- Eman, Suparman. *Penahanan Tersangka Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*. Bandung: Logoz Publishing, 2019.
- Faal, Muhammad. *Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesai*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ghozali, Lathoif. *Dinamika Ijtihad Tidak Pernah Tertutup*. Surabaya: Imtiyaz, 2021.

- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- . *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Harifin A. Tumpa. *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Hiariej, Edward Omar Sharif. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Humas Polresta Sidoarjo. *Profil Polresta Sidoarjo*. Sidoarjo: Polresta Sidoarjo, 2023.
- Junaidy, Abdul Basith, Nurlailatul Musyafa'ah, Syamsuri, and Moh. Mufid. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Kelana, Momo. *Hukum Kepolisian*. Cetakan keempat. Jakarta: Grasindo, 1984.
- Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha. *Struktur Organisasi Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo*. Sidoarjo: Satuan Reserse Narkoba, 2023.
- M. Junaedi. "Wawancara Dengan Kaurbin OPS," November 13, 2023. Polresta Sidoarjo.
- Mubarok, Mubarok. "Diskresi Hukum dan Kaitannya Dengan Ijtihad." *Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (October 26, 2009): 176–191.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Negara Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*, n.d.
- Permono, Yora Selia, and Wreda Danang Widoyoko. "Prosedur Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Di Satrespolresta Sidoarjo." Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021.
- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2020.
- Pramono, Gatot Eddy, Mexsasai Indra, and Oce Madril. *Kewenangan Dan Diskresi Kepolisian Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Prana, Anak Agung Gede Mahardi, I Made Minggu Widyantara, and Luh Putu Suryani. "Diskresi Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Study Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Padangbai Karangasem)." *Jurnal Analogi Hukum* 1 (2019).

- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- . *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metodologi Dan Perilaku Masalah*. Surakarta: UMS Surakarta, 2006.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*, 1945.
- . *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997*, 1997.
- Rijal, Andi Haerur. “Penerapan Diskresi Oleh Aparat Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.
- Santosa, Bambang. “Wawancara Dengan KANIT IDIK II,” November 13, 2023.
- Soultan, Athar. “Analisis Hukum Kebijakan Diskresi Oleh Pemerintah Dalam Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 45/Pid.Sus/Tpk/2011/Pn.Bdg).” Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020.
- Sumardi, Dedy. “Hudud Dan Ham: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed an-Na’Im.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 35, no. 2 (2011): 372–390.
- Yazîd, Ibn Mājah Abū ‘Abdillāh Muhammad Ibn. *Sunan Ibn Mājah*. Juz 2. Dar Ihyā’ Al-Kutub Al- ‘Arabiyyah, 2010.
- Yulianti, Lulu. “Sejarah Diskresi Dan Unsur Menyalahgunakan Wewenang Dalam Ranah Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Journal Mandalanursa* 4 (2020).
- “Al-Qur’an,” n.d.
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta: Laksbang, 2005) Hal. 173, n.d.
- Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, 1981.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, 2014.